

Revitalizing the Role of Women for the Effectiveness of Strategic Management of Sustainable Regional Development: Reconstruction of Gender Ideology in the Perspective of Islamic Law

Faiz Faricha¹, Abdul Halim²

Institut Agama Islam Al Muhammad Cepu

email: faiz_aidal@yahoo.co.id*, abdulhalimmujtaba22@gmail.com

Diterima: November 2025

Disetujui: Desember 2025

Dipublikasikan: Desember 2025

ABSTRACT

The acceleration of sustainable regional development is often hampered by theological construction bias and managerial inefficiencies that limit the potential of women's human capital. This research aims to reconstruct gender ideology in the perspective of Islamic law and analyze strategies for revitalizing the role of women in regional development management. Using a qualitative approach with a socio-legal case study design, data was collected through in-depth interviews and focused discussions with key informants from elements of the management of KOPRI PMII, local government development planners (Bappeda), and Islamic law scholars/experts. The findings of the study reveal that there is an epistemological stagnation where the cadre curriculum is still dominated by domestic fiqh narratives that fail to legitimize women's public leadership. In addition, a significant capability gap was found between the high level of ideological militancy and the low technocratic competence in the digital era, which resulted in women's participation in development planning deliberations (Musrenbang) being trapped in the practice of tokenism or merely symbolic formalities. This study concludes that the effectiveness of regional strategic management demands the transformation of the women's movement from a textualist paradigm to a Mubadalah (mutuality) approach, accompanied by mastery of data-driven policy analysis to ensure substantive involvement in regional budget politics.

Keywords: Gender Ideology, Islamic Law, Strategic Management.

ABSTRAK

Akselerasi pembangunan daerah berkelanjutan seringkali terhambat oleh bias konstruksi teologis dan inefisiensi manajerial yang membatasi potensi modal manusia perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi ideologi gender dalam perspektif hukum Islam serta menganalisis strategi revitalisasi peran perempuan dalam manajemen pembangunan daerah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus *socio-legal*, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan diskusi terpumpun dengan informan kunci dari unsur pengurus KOPRI PMII, perencana pembangunan pemerintah daerah (Bappeda), serta ulama/ahli hukum Islam. Temuan penelitian mengungkapkan adanya stagnasi epistemologis di mana kurikulum pengkaderan masih didominasi oleh narasi fikih domestik yang gagal melegitimasi kepemimpinan publik perempuan. Selain itu, ditemukan kesenjangan kapabilitas yang signifikan antara tingginya militansi ideologis dengan rendahnya kompetensi teknokratis di era digital, yang mengakibatkan partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) terjebak pada praktik tokenisme atau sekadar formalitas simbolik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas manajemen strategis daerah menuntut transformasi gerakan perempuan dari paradigma tekstualis menuju pendekatan *Mubadalah* (kesalingan), yang disertai dengan penguasaan analisis kebijakan berbasis data untuk memastikan keterlibatan substantif dalam politik anggaran daerah.

Kata Kunci: Ideologi Gender, Hukum Islam, Manajemen Strategis.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah yang berkelanjutan (*sustainable regional development*) pada abad ke-21 tidak lagi dapat direduksi semata-mata sebagai akumulasi pertumbuhan ekonomi agregat dan ekspansi infrastruktur fisik. Paradigma pembangunan modern telah bergeser secara fundamental menempatkan modal manusia (*human capital*) sebagai poros utama akselerasi kemajuan daerah. Dalam diskursus ini, perempuan menempati posisi sentral sekaligus paradoksal; di satu sisi, perempuan diakui sebagai aset vital dalam menyongsong bonus demografi, namun di sisi lain, potensi mereka seringkali teramputasi oleh konstruksi ideologi gender yang bias yang membatasi partisipasi di ruang publik. Rodgers (2010) dalam studi seminarnya menegaskan bahwa modernisasi ekonomi di negara berkembang justru meminggirkan peran tradisional perempuan jika tidak disertai adaptasi inklusif (Rodgers, 2010). Oleh karena itu, efektivitas manajemen strategis dalam pembangunan daerah sangat bergantung pada sejauh mana suatu wilayah mampu mendekonstruksi hambatan ideologis tersebut dan merevitalisasi peran perempuan.

Secara konseptual, ideologi gender merujuk pada sistem nilai terinternalisasi yang mendikotomikan peran dan tanggung jawab berbasis jenis kelamin biologis, yang seringkali melembaga dalam kebijakan publik (Fakih, 2013). Dalam konteks pembangunan, literatur mencatat pergeseran paradigma dari *Women in Development* (WID) menuju *Gender and Development* (GAD), yang menuntut transformasi relasi kuasa yang timpang, bukan sekadar penambahan kuantitas perempuan dalam proyek (Kanji, 2003; Mwije, 2014). Dari perspektif Hukum Islam, diskursus ini direkonstruksi oleh sarjana kontemporer seperti Kodir (2019) melalui konsep *Mubadalah* (kesalingan), yang menawarkan landasan teologis bahwa Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar (*partners*) dalam mandat *khalifah* (Kodir, 2019). Namun, integrasi nilai teologis progresif ini ke dalam manajemen strategis daerah masih menghadapi tantangan implementasi yang nyata.

Fakta sosial menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang lebar antara kebijakan normatif dan realitas empiris. Meskipun kerangka regulasi seperti RPJMN telah mengadopsi narasi pengarusutamaan gender, dan studi membuktikan bahwa kesetaraan gender berkontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan (Rohmatilah, 2023) serta pertumbuhan ekonomi daerah (Mahzanallah et al., 2025), data BPS (2024) menunjukkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di berbagai provinsi masih stagnan di bawah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kesenjangan ini diperparah oleh bias struktural dalam pencatatan ekonomi daerah. Soputan & Kerebungu (2020) menyoroti bahwa di pedesaan, perempuan mendominasi sektor ekonomi informal, namun kontribusi

ini tidak tercatat dalam statistik formal (Grace Jenny Soputan & Ferdinand Kerebungu, 2020; Soputan & Kerebungu, 2020), sehingga aspirasi mereka dalam Musrenbang sering tereliminasi oleh prioritas infrastruktur yang maskulin (Prastiwi & Yunas, 2025; dodiet aditya Setyawan, 2021).

Penelitian terdahulu mengenai relasi gender dan pembangunan telah banyak dilakukan, namun masih menyisakan celah teoretis yang signifikan. Literatur yang ada umumnya terpolarisasi pada dua kutub: studi kebijakan publik makro yang bersifat *top-down* (Aprianti et al., 2022; Hulu et al., 2024) atau studi kasus mikro pada kelompok perempuan di akar rumput (Hidayat & Purworini, 2025). Sementara itu, studi mengenai gerakan perempuan Islam (Qibtiyah, 2019; Sarifa Suhra, 2013) cenderung lebih fokus pada aspek advokasi hukum dan kurang menyentuh dimensi manajemen strategis ekonomi-politik. Selain itu, dalam konteks era disrupsi, literatur terbaru mulai menyoroti "gender digital divide" sebagai penghambat baru (Astutiningsih et al., 2024; Deselia & Sinaga, 2024), namun belum banyak yang menawarkan model mitigasi melalui penguatan kaderisasi organisasi.

Keterbatasan literatur di atas menunjukkan adanya kekosongan analisis (*gap of theory*) mengenai peran "agen perantara" (*middle-range agent*) yakni organisasi mahasiswa dan pergerakan perempuan dalam menerjemahkan nilai teologis dan kebijakan makro menjadi aksi strategis. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada sintesis antara rekonstruksi ideologi gender berbasis hukum Islam (*Mubadalah*), manajemen strategis pembangunan, dan peran taktis organisasi kaderisasi (KOPRI PMII). Penelitian ini tidak hanya memotret masalah ketimpangan, tetapi menawarkan kerangka konseptual materi keperempuanan yang adaptif terhadap tantangan digital dan otonomi daerah, mengisi celah yang belum banyak dieksplorasi oleh peneliti sebelumnya (Hidayat & Purworini, 2025).

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi materi ideologi gender dalam perspektif hukum Islam yang relevan dengan tantangan kontemporer, serta menganalisis peran strategis perempuan dalam akselerasi pembangunan daerah. Urgensi penelitian ini tidak dapat ditunda mengingat visi Indonesia Emas 2045 mensyaratkan partisipasi penuh seluruh elemen bangsa. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi *blueprint* bagi revitalisasi gerakan perempuan agar tidak terjebak dalam ritual organisasi, melainkan bertransformasi menjadi katalisator kebijakan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) yang diintegrasikan dengan perspektif *socio-legal research*. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi secara holistik bagaimana konstruksi ideologi gender dipahami dalam ruang teologis organisasi dan bagaimana implementasinya berinteraksi dengan kebijakan manajemen pembangunan daerah. Perspektif *socio-legal* digunakan secara spesifik untuk tidak hanya menelaah teks hukum Islam secara normatif, melainkan juga menganalisis bekerjanya hukum dan nilai agama tersebut dalam konteks realitas sosial dan kebijakan publik (Bedner, 2016). Melalui desain ini, penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan orientasi pada pembangunan teori (*theory building*) guna merekonstruksi materi pengkaderan yang responsif terhadap dinamika manajemen strategis daerah (Creswell & Poth, 2018).

Pemilihan subjek penelitian dilakukan melalui teknik *purposive sampling* yang dilanjutkan dengan *snowball sampling* untuk menjamin bahwa informan memiliki kapasitas pengetahuan dan pengalaman otentik yang relevan dengan fokus studi. Sumber data primer diklasifikasikan ke dalam tiga klaster strategis untuk mendapatkan perspektif yang berimbang. Klaster pertama adalah unsur internal organisasi yang meliputi Pengurus Besar (PB) dan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) KOPRI PMII serta kader aktif, yang berfungsi untuk menggali *grand design* kurikulum dan internalisasi nilai ideologis. Klaster kedua melibatkan unsur pembuat kebijakan daerah (*policy makers*), khususnya pejabat Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), guna memverifikasi integrasi isu gender dalam dokumen perencanaan daerah. Sementara itu, klaster ketiga terdiri dari akademisi hukum Islam dan pengamat kebijakan publik yang berperan memberikan *expert judgment* terhadap validitas kerangka konseptual *Mubadalah* dan strategi manajemen yang ditawarkan (Patton, 2015).

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, proses pengumpulan data menerapkan prinsip triangulasi metode dan sumber secara ketat. Peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara semi-terstruktur kepada informan kunci untuk menangkap interpretasi subjektif mengenai hambatan dan peluang partisipasi perempuan. Proses ini diperkaya dengan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan dalam dua tahapan, yakni sesi internal untuk membedah modul kaderisasi dan sesi multi-stakeholder untuk merumuskan model strategi pembangunan. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan secara komprehensif terhadap literatur kitab kuning (*Kutub at-Turath*) sebagai basis teologis, serta dokumen teknokratis seperti RPJMD, Renstra

DP3A, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menganalisis porsi keberpihakan anggaran atau *gender budgeting* (Denzin & Lincoln, 2018).

Analisis data dilaksanakan dengan mengadopsi model interaktif dari Miles, Huberman (2014) yang berlangsung secara sirkuler, meliputi tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Haryono et al., 2024). Dalam proses ini, data lapangan yang masif dipetakan pola temanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rigoritas analisis, memastikan transparansi proses pengkodean (*coding*), serta memvisualisasikan interkoneksi yang kompleks antara variabel teologi Islam, kapasitas agensi perempuan, dan efektivitas manajemen pembangunan daerah secara presisi (Sariman et al., 2024). Verifikasi akhir dilakukan melalui *member checking* kepada informan kunci untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti akurat dan mewakili realitas fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan analisis triangulasi data yang bersumber dari wawancara mendalam terhadap 15 informan kunci (Pengurus KOPRI, Pejabat Bappeda, dan Tokoh Agama), observasi partisipatif pada kegiatan Sekolah Islam Gender (SIG) dan Sekolah Kader KOPRI (SKK), serta studi dokumentasi terhadap modul kaderisasi dan dokumen perencanaan daerah (RPJMD), penelitian ini menemukan adanya pergeseran dinamis namun belum tuntas dalam konstruksi ideologi gender.

Secara empiris, data observasi menunjukkan bahwa materi pengkaderan di tingkat basis masih didominasi oleh narasi "fikih wanita" yang cenderung domestik (haid, nifas, dan kewajiban istri), sementara materi mengenai kepemimpinan publik dan analisis kebijakan strategis hanya menempati porsi kurang dari 20% dalam kurikulum. Wawancara dengan informan internal KOPRI mengungkapkan adanya kegelisahan intelektual bahwa kurikulum lama dianggap tidak lagi relevan dengan tantangan ekonomi digital dan dinamika politik lokal. Di sisi lain, data dari wawancara dengan pihak eksternal (Bappeda) mengonfirmasi bahwa partisipasi kader perempuan dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) seringkali bersifat administratif atau "penggugur kewajiban" representasi perempuan, tanpa substansi usulan kebijakan yang berbasis data strategis.

Temuan penelitian ini dapat dikristalisasi ke dalam tiga domain utama sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Matriks Temuan Penelitian: Rekonstruksi Ideologi dan Manajemen Strategis

Fokus Temuan	Data Empiris (Wawancara, Observasi, Dokumen)	Pola/Indikasi Utama
Temuan 1: Rekonstruksi Epistemologi Gender	- Dokumen modul masih merujuk tafsir klasik yang bias. - Wawancara Kader: "Kami diajarkan menjadi pendamping suami, bukan mitra setara." - Wawancara Ulama: Adanya resistensi terhadap tafsir progresif di level lokal.	Transisi lambat dari paradigma <i>ibwiyah</i> (keibuan/domestik) menuju paradigma <i>insaniyah</i> (kemanusiaan/publik), namun terhambat oleh kultur patriarki organisasi.
Temuan 2: Revitalisasi Kompetensi Strategis	- Observasi: Minimnya pelatihan <i>data analyst</i> dan <i>digital advocacy</i>. - Wawancara: Kesenjangan keterampilan (<i>skill gap</i>) antara lulusan kaderisasi dengan kebutuhan pasar kerja daerah. - Dokumen: Absennya materi manajemen strategis dalam silabus SKK.	Terjadinya <i>Organizational Lag</i> ; struktur organisasi lambat merespons perubahan eksternal, mengakibatkan kader gagap teknologi dan manajerial.
Temuan 3: Efektivitas dalam Pembangunan Daerah	- Dokumen APBD: Anggaran Responsif Gender (ARG) di bawah 5%. - Wawancara Bappeda: Usulan perempuan seringkali ditolak karena dianggap tidak prioritas (infrastruktur vs sosial). - Observasi: Kurangnya lobi politik strategis berbasis data oleh aktivis perempuan.	Partisipasi perempuan terjebak pada level <i>Tokenism</i> (simbolis); hadir secara fisik namun nihil pengaruh dalam keputusan strategis (<i>decision making</i>).

Pembahasan

1. Rekonstruksi Ideologi Melalui Pendekatan *Mubadalah*

Temuan pertama menunjukkan adanya stagnasi kurikulum yang masih berkatat pada fikih biologis. Hal ini menegaskan tesis Fakih (2013) bahwa ketidakadilan gender seringkali dilegitimasi oleh interpretasi keagamaan yang tekstual (Fakih, 2013). Namun, penelitian ini menemukan adanya upaya resistensi intelektual dari kader muda yang menuntut pembaruan. Dalam perspektif teori, temuan ini sejalan dengan kerangka *Mubadalah* (Kesalingan) yang digagas oleh Kodir (2019). Jika penelitian terdahulu dari Qibtiyah (2019) menyoroti peran organisasi dalam advokasi eksternal, temuan studi ini

memperdalam analisis bahwa hambatan terbesar justru bersifat internal, yakni "mental block" teologis.

Rekonstruksi ideologi dalam konteks ini tidak berarti membuang teks klasik, melainkan melakukan rekontekstualisasi. Temuan ini membantah asumsi bahwa gerakan perempuan Islam harus menjadi sekuler untuk maju. Sebaliknya, revitalisasi peran perempuan justru efektif ketika menggunakan bahasa agama yang egaliter. Integrasi konsep *khalifah fil ardh* yang tidak membedakan jenis kelamin menjadi landasan ontologis baru bagi manajemen KOPRI, mengubah orientasi kader dari "pelayan domestik" menjadi "manajer strategis" peradaban (Anggoro, 2019).

2. Manajemen Strategis dan Tantangan Digital Gender Divide

Temuan kedua mengenai kesenjangan kompetensi manajerial dan digital menyoroti urgensi pembaruan metode gerakan. Berbeda dengan temuan Hidayat (2025) yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi mikro (UMKM), studi ini menemukan bahwa kelemahan mendasar bukan pada modal ekonomi, melainkan pada modal intelektual-strategis (*strategic intellectual capital*) (Hidayat & Purworini, 2025). Temuan ini relevan dengan teori *Human Capital* yang diadaptasi dalam konteks era disrupsi, di mana kompetensi digital menjadi mata uang baru.

Penelitian ini mengonfirmasi peringatan dari Astutiningsih (2024) mengenai *digital gender divide*. Kader perempuan tertinggal bukan karena akses internet, melainkan literasi pemanfaatan data (*data literacy*) untuk advokasi (Astutiningsih et al., 2024). Dalam manajemen strategis pembangunan, kemampuan membaca "Big Data" daerah adalah kunci. Tanpa revitalisasi pelatihan yang memasukkan materi analisis kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan manajemen proyek digital, peran perempuan akan terus terpinggirkan oleh teknokrasi yang maskulin (Deselia & Sinaga, 2024).

3. Melampaui Tokenism dalam Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Temuan ketiga mengungkap fakta krusial bahwa kehadiran perempuan dalam forum perencanaan daerah (Musrenbang) masih bersifat tokenistik. Hal ini memperkuat temuan Setyawan et al. (2019) dan Prastiwi & Yunas (2025) bahwa desentralisasi tidak otomatis menjamin inklusivitas (Prastiwi & Yunas, 2025; D. Setyawan et al., 2019). Dialog teori dengan konsep *Substantive Representation* menunjukkan bahwa "jumlah" (kuantitas) kader perempuan di ruang publik tidak berbanding lurus dengan "pengaruh" (kualitas) kebijakan.

Inefisiensi manajemen strategis pembangunan daerah terjadi karena aspirasi perempuan seringkali dianggap sebagai isu sosial semata, bukan isu ekonomi. Padahal, studi Mahzanallah et al. (2025) membuktikan korelasi positif antara pendapatan

perempuan dan penurunan kemiskinan daerah (Mahzanallah et al., 2025). Oleh karena itu, rekonstruksi peran perempuan harus diarahkan pada kemampuan "bahasa anggaran". Kader perempuan harus mampu menerjemahkan isu ketidakadilan gender menjadi bahasa indikator kinerja utama (IKU) dan efisiensi anggaran daerah, sehingga usulan mereka memiliki daya tawar teknokratis di hadapan Bappeda (Aprianti et al., 2022).

Secara teoretis, penelitian ini mengimplikasikan perlunya integrasi kurikulum *socio-theological* dalam studi manajemen publik Islam. Secara praktis, studi ini merekomendasikan:

1. Reformasi Kurikulum: KOPRI PMII harus mengadopsi materi *Strategic Gender Planning* dan Analisis Anggaran dalam modul pengkaderan formal.
2. Aliansi Strategis: Perlunya kolaborasi penta-helix antara organisasi perempuan, universitas, dan pemerintah daerah untuk menciptakan "inkubator kepemimpinan perempuan" yang melek data.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan geografis yang terfokus pada satu wilayah administratif, sehingga generalisasi pada konteks budaya yang berbeda perlu dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, perspektif *policy makers* yang digali masih terbatas pada eksekutif, belum mendalami dinamika politik transaksional di legislatif (DPRD) yang juga memengaruhi penganggaran. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan *longitudinal* guna mengukur dampak perubahan kurikulum pelatihan terhadap mobilitas vertikal kader perempuan dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis peneliti dan pembahasan yang mendalam, penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya rekonstruksi ideologi gender dalam tubuh organisasi pergerakan masih mengalami stagnasi epistemologis yang signifikan. Meskipun wacana kesetaraan gender berbasis nilai *Mubadalah* (kesalingan) telah bergulir di tingkat elit intelektual, kurikulum pengkaderan di tingkat basis masih terbelenggu oleh narasi teologis yang berorientasi domestik, sehingga gagal memberikan legitimasi yang kokoh bagi perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan strategis di ruang publik.

Temuan ini menegaskan bahwa inefisiensi dalam manajemen strategis pembangunan daerah bukan disebabkan oleh ketiadaan ruang partisipasi, melainkan akibat kesenjangan kapabilitas (*capability gap*) antara militansi ideologis kader dengan tuntutan kompetensi teknokratis di era ekonomi digital. Akibatnya, partisipasi perempuan dalam forum perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) terjebak pada praktik tokenisme, di mana kehadiran mereka hanya bersifat prosedural dan simbolis tanpa

kemampuan substantif untuk mengintervensi kebijakan anggaran atau *budgeting politics* yang menjadi jantung pembangunan daerah berkelanjutan. Dengan demikian, revitalisasi peran perempuan terhambat bukan oleh ajaran agama, melainkan oleh kelembaman institusi dalam mentransformasi modal sosial menjadi modal politik dan teknokrasi yang terukur.

Bertolak dari kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah strategis baik bagi internal organisasi maupun pemangku kebijakan. Bagi organisasi kaderisasi seperti KOPRI PMII, mendesak dilakukan reformasi kurikulum yang radikal dengan mengurangi porsi materi fikih domestik dan mengintegrasikan materi perencanaan strategis, analisis data anggaran daerah, serta advokasi digital guna mencetak kader yang memiliki kapasitas teknokratis-aktivis. Sementara bagi pemerintah daerah, disarankan untuk mengubah mekanisme pelibatan perempuan dari sekadar partisipasi formal dalam musyawarah menjadi pelibatan substantif dalam tim penyusun indikator kinerja program sejak tahap pra-perencanaan. Penelitian ini juga menyarankan agar studi mendatang memperluas analisis pada dinamika politik transaksional di ranah legislatif (DPRD) untuk memetakan secara presisi di mana distorsi anggaran responsif gender terjadi, serta melakukan studi komparatif antar-wilayah budaya untuk menguji adaptabilitas model rekonstruksi ideologi yang ditawarkan.

BIBLIOGRAPHY

- Anggoro, T. (2019). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam. *Afkaruna*, 15(1), 129–135. <https://doi.org/10.18196/aiijis.2019.0098.129-134>
- Aprianti, H., Umam, K., & Suparman, N. (2022). Anggaran Responsif Gender: Meminimalisir Disparitas Partisipasi dan Akses Perempuan dalam Pembangunan. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 4, 53–62. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i2>
- Astutiningsih, S., Budiani, S. R., Giyarsih, S. R., & Marwasta, D. (2024). Partisipasi Kerja Perempuan dalam Sektor Informal di Kawasan Pinggiran Kota Yogyakarta (Studi Kasus Dusun Tambakbayan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(1), 83–92. <https://doi.org/10.23887/jish.v13i1.72652>
- Bedner, A. (2016). Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transdisciplinary Legal Research. *Hague Journal on the Rule of Law*, 8(2), 253–273.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). Sage Publications.
- Deselia, S., & Sinaga, H. (2024). Gender Disparities in Technological Proficiency. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 8(2), 106–121. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Fakih, M. (2013). *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Grace Jenny Soputan, & Ferdinand Kerebunu. (2020). Women's Economic Empowerment in the Informal Sector. *Salasika, Indonesian Journal Of Gender, Women, Child, And Social Inclusion's Studies*, 3(1), 167–186. <https://www.salasika.org/index.php/SJ/article/view/57/32>
- Haryono, E., Rangkuti, Rizki Kurniawan, Sariman, S., & Suprihatiningsih, S. (2024). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif . In <https://www.rcipress.rcipublisher.org/index.php/rcipress/catalog/book/949> (Vol. 1, p. 248). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Hidayat, R., & Purworini, D. (2025). Peran Komunikasi Dialogis dan Modal Sosial dalam Pengembangan Desa Wisata Rotan Trangsan, Jawa Tengah. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 7(1), 140–157.
- Hulu, M. J., Halawa, O., Waruwu, E., & Waruwu, M. H. (2024). Analisis Kebijakan Kesetaraan Gender Dalam Meningkatkan Kepuasan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli. *Jurnal Visi Sosial Humaniora*, 2024(02), 253–270.

- Kanji, N. (2003). From Women in Development (WID) to Gender and Development (GAD). In *Mind the Gap: Mainstreaming Gender and Participation in Development* (pp. 3–10). International Institute for Environment and Development. <http://www.jstor.org/stable/resrep18134.5>
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam*. IRCiSoD.
- Mahzanallah, M., Amri, K., & Fitri, C. D. (2025). The Effect of Gender Empowerment and Women's Income on Poverty in Indonesia: Economic Growth as a Moderating Variable. *Golden Ratio of Data in Summary*, 5(3), 705–718. <https://doi.org/10.52970/grdis.v5i3.1310>
- Mwije, S. (2014). *A paradigm shift from women in development (WID) to gender and development (GAD)*. 0–21.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). Sage Publications.
- Prastiwi, J. H., & Yunas, N. S. (2025). Women's accessibility and production of gender-responsive policies through thematic Musrenbang in Malang City, Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 12(1). <https://doi.org/10.18196/jgpp.v12i1.19432>
- Qibtiyah, A. (2019). *Feminisme Muslim di Indonesia*. Suara Muhammadiyah.
- Rodgers, Y. (2010). Woman's Role in Economic Development. Ester Boserup. London: Earthscan 1970. With a new introduction by Nazneen Kanji, Su Fei Tan, and Camilla Toulmin (reprinted 2007). *International Journal of Social Economics*, 37, 339–340. <https://doi.org/10.1108/03068291011025282>
- Sarifa Suhra. (2013). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 373–394.
- Sariman, Haryono, E., Wahyudin, M., & Muttaqin, F. Z. (2024). Exploring Research Methodologies Qualitative In Higher Education: Strategies And Approaches For Academic Inquiry. *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu*, 4(01), 74–103. <https://www.ejournal.smaamc.sch.id/index.php/belajar/article/view/43>
- Setyawan, dodiet aditya. (2021). *Tahta Media Group v.penelitian*.
- Setyawan, D., Rohman, A., & Rusmiwari, S. (2019). Policy and planning of responsive gender budgeting model in Indonesia. *Public Policy and Administration Research*, 9(7). <https://doi.org/10.7176/PPAR/9-7-07>
- Soputan, G. J., & Kerebungu, F. (2020). Women's economic empowerment in the informal sector. *Salasika Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.36625/sj.v3i1.57>